

Besarnya Dampak Pandemi Pada Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Pantai

Astri Hidayah Illahi¹

Pendidikan luar sekolah
Fakultas ilmu pendidikan
Universitas Negeri Padang
Email: astrihdy@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program kegiatan yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih berdaya, mampu mengembangkan diri, meningkatkan potensi diri hingga menjadi pribadi yang lebih mandiri. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini tentunya mengharapakan suatu kemajuan pada masyarakat yang diberdayakan dalam pelaksanaannya. Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan dari dampak yang diberikannya kepada masyarakat yang bahkan dirasakan hampir diseluruh dunia. Dalam pemberdayaan masyarakat juga terjadi kendala, yang mana kondisi pandemi menyebabkan terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Sebagaimana yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat, hal ini juga terjadi pada masyarakat wilayah pesisir pantai. Kondisi ini membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir pantai mengalami beberapa masalah dari terkendalanya kegiatan yang dilakukan dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19. Besarnya dampak yang terjadi membuat belum tercapainya beberapa tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang diharapkan.

Kata Kunci: dampak, pandemi, Covid-19, pemberdayaan masyarakat, pesisir pantai.

The Enormous Impact of the Pandemic on Community Empowerment of Coastal Areas

Abstract

Community empowerment is a program of activities that aims to make people more empowered, able to develop themselves, increase their potential to become more independent individuals. The implementation of community empowerment certainly expects progress in the empowered community in its implementation. The occurrence of the Covid-19 pandemic caused a change in the impact it had on society which was felt almost all over the world. In community empowerment, there are also obstacles, in which the pandemic conditions have hampered the implementation of several empowerment activities carried out. As happened in community empowerment, this also happened to

coastal communities. This condition makes community empowerment activities in coastal areas experience several problems from the constraints of activities carried out due to the Covid-19 pandemic. The magnitude of the impact that has occurred has prevented some of the expected community empowerment goals from being achieved.

Keywords: impact, pandemic, Covid-19, community empowerment.

PENDAHULUAN

Masalah Adanya penyakit Covid 19 menyebabkan terjadi banyaknya perubahan pada kehidupan masyarakat. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia (WHO, 2020). Dapat kita lihat, kesehatan dimasyarakat sudah tidak stabil lagi dimana masyarakat sudah banyak mengidap beberapa penyakit salah satunya adalah covid-19.

Dalam dunia pendidikan ada dua dampak terhadap keberlangsungannya yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertama adalah dampak jangka pendek, yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia baik di kota maupun di desa. Di Indonesia banyak keluarga yang kurang familier melakukan sekolah di rumah. Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Demikian juga dengan problem psikologis anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka.

Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial “terpapar” sakit karena covid-19 (Syah, 2020).

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Munawar, 201 C.E.). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dapat ditempuh agar masyarakat memiliki daya saing dan berdaya guna dalam berbagai segi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya (Lukman, 2021).

Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagaibagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Untuk itu, manusia/masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara

normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu dalam kegiatan, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya pengenalan terhadap hakekat manusia yang akan memberikan sumbangan untuk menambah wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat (Ir. Hendra Hamid, 2018).

Pemberdayaan masyarakat sangat terkait erat dengan perubahan pola pikir, perilaku dan pola hidup, sehingga masyarakat akan membutuhkan waktu untuk berfikir dan memahaminya. Dalam proses sosialisasi, para agen/aparat pemberdayaan hendaknya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat calon penerima manfaat, bahwa tugas dan tanggung jawab yang mereka emban adalah sebagai fasilitator atau pendamping, sehingga masyarakat dapat memahami sejak awal bahwa merekalah yang bertindak sebagai pelaku utama, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan seluruh tahapan program/kegiatan pemberdayaan.

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat

sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang (Safyuddin et al., 2017).

Penduduk di wilayah pesisir pantai memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah, dimana pada musim barat, sebagian nelayan tidak melaut dan sebagian besar dari mereka hanya bergantung hidupnya pada ikan di laut (Kristiyanti, 2016). Pelaksanaan wilayah pesisir pantai sebagai tempat wisata juga merupakan salah satu bentuk mata pencaharian penduduk. Pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir pantai dilaksanakan untuk mendukung atau menunjang kehidupan masyarakat agar lebih maju dan berdaya.

METODE

Metode yang dilakukan yaitu studi literatur yang mana dilakukan melalui pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Dilakukan dengan cara mencari referensi atas landasan teori yang relevan dengan kasus atau

permasalahan yang ditemukan. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008). Secara Umum Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka (Judithia, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan keadaan sumber daya manusia yang kurang berkualitas pada saat mengalami pandemi seperti ini pastinya sangatlah berpengaruh karena minimnya pengetahuan, dan kurangnya inovasi agar sebuah potensi bisa dikembangkan lagi. SDM yang kurang berkualitas ini disebabkan mereka enggan untuk memajukan tempat atau potensi yang berada di lokasi pesisir pantai, serta jumlah penduduk yang masih kurang karena mereka rata-rata pergi merantau, dan jarang ada yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan terhambatnya proses ekonomi masyarakat. Keadaan ini membuat fokus masyarakat teralihkan. Dari perencanaan kegiatan pemberdayaan yang

dilakukan hingga menjadi teralihkan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat yang harus mereka penuhi agar keadaan ekonominya dapat kembali stabil. Pendapatan masyarakat yang berkurang karena usaha yang mereka jalankan mengalami kendala seperti berkurangnya pembeli, kurangnya pengunjung, hingga pembatasan kegiatan yang menyebabkan rendahnya pendapatan yang didapatkan.

Masyarakat pesisir sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya (Kristiyanti, 2016).

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri (Anita Fauziah dalam (GASSING, 2021). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya, (Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomis seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi. Penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi

masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini (Cholisin, 2011). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu klien memperoleh kekuatan dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan berkenaan dengan dirinya dengan meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri (Maulida, 2021).

Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia. Kartasmita mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam

sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen.

Kelompok masyarakat pesisir di dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri diartikan sebagai kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan. Nikijulw mendefinisikan masyarakat pesisir sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik kapal, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya (Aset et al., 2013).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan

(freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto dalam (Abidin As, 2019)). Strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus,

pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM, termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat (Hikmat dalam (Abidin As, 2019)).

Pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan, sasaran utamanya adalah kepada masyarakat pesisir, baik yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang maupun kepada para istri nelayan. Dalam perkembangannya, pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi kegiatan atau agenda yang begitu penting bagi pemerintah, mengingat kondisi masyarakat pesisir yang dinilai masih rendah. Masyarakat pesisiran menunjukkan beberapa ciri. Sikapnya cenderung lugas, spontan, (Ambo, dalam (Wiwik & M.Farid Ma'ruf, S.Sos., 2011)).

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat. Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat nelayan haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran (Ramadhani, 2017).

Pemberdayaan masyarakat pesisir seharusnya lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sayangnya potensi yang demikian besar tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga masyarakat pesisir di Indonesia masih berada dalam kondisimiskin, dengan kata lain masih belum sejahtera (Nuryanto & Haryono dalam (Iswari et al., 2019)).

Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sedangkan sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin di

capai oleh sebuah perubahan sosial. Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai sumber daya manusia dan mengembangkan potensi alam yang ada di sekitarnya, sehingga masyarakat di arahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat dan partisipasinya. Selain membangun dan mengembangkan potensi wilayah dampak pemberdayaan juga merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (GASSING, 2021).

Selain potensi alamnya juga tidak melupakan peran masyarakat sebagai potensi yang dapat di manfaatkan untuk menguatkan pengembangan wilayah pesisir pantai, peran pemberdayaan masyarakat tentunya dibutuhkan dalam hal tersebut. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya. Namun keadaan pandemi covid-19 ini membuat proses pemberdayaan masyarakat itu mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai

karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagaimana masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan lautan (Kusnadi dalam (Abidin As, 2019)).

Program pemberdayaan masyarakat sejatinya merupakan program yang dapat melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Juga diartikan sebagai program yang berpangkal dan berbasis pada masyarakat sebagai subjek karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dalam kacamata strukturasi, pemberdayaan nelayan merupakan suatu usaha yang memungkinkan terjadinya perubahan struktur, yakni dengan membebaskan nelayan dari ketergantungan terhadap pihak lain, baik pemerintah maupun juragan. Dengan begitu, nelayan dapat keluar dari jaring kemiskinan yang mengekangnya untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Akan tetapi bukan berarti nelayan harus tercerai dari relasi sosial yang mengikatnya sebagai modal dalam mengembangkan kapasitas kelembagaannya. Artinya program pemberdayaan juga dibutuhkan

sebagai sarana dalam membangun kerekatan sosial dalam rangka pengembangan komunitas nelayan miskin (Amriwan, n.d.).

Nelayan tradisional merupakan masyarakat kecil, masyarakat miskin yang sudah ada sejak zaman dulu. Salah satu alasan kemiskinan ini adalah rendah produktivitas dan pendapatan nelayan. Secara struktur, nelayan terkungkung dalam kemiskinan. Nelayan tidak berdaya dan tidak punya kekuatan untuk keluar dari kemiskinan. Begitu miskinnya, masyarakat nelayan sering disebut kelompok miskin di antara yang miskin. Kecuali mereka diberdayakan, ada yang mengangkat mereka berupa memberikan daya dan kekuatan dari luar mereka, maka mereka bias keluar dari kemiskinan.

Menurut Kusnadi, ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal inimencakup masalah: 1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, 2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, 3) hubungan kerja (pemilik perahunelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan

nelayan buruh, 4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, 5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan 6) gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan. Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah: 1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial, 2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, 3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengrusakan terumbu karang, dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir 4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, 5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan, 6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen, 7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, 8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia (Kusnadi, dalam (Abidin As, 2019)).

Menurut Sumodiningrat, menyatakan bahwa strategi pemberdayaan pada dasarnya memiliki tiga arah yaitu: pertama, pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pementapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan struktur politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat (GASSING, 2021).

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan antara lain bermakna bahwa suatu masyarakat tersebut menjadi bagian dari pelaku pembangunan itu sendiri. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain bagaimana suatu inovasi yang lebih maju dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana budaya lokal (termasuk kearifan lokal), bagaimana pula mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan tersebut. Pemberdayaan masyarakat nelayan diperlukan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai keajahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan (Abidin As, 2019).

Terjadinya pandemi juga berdampak dalam belum tercapainya tujuan untuk pengembangan usaha warga dan meningkatkan perekonomian rumah tangga yang menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam proses pemberdayaan. Selain itu terhambatnya proses menjadikan masyarakat lebih produktif dan memiliki kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya dalam meningkatkan usaha yang dijalankan hingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lainnya.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM, termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat (Hikmat dalam (Abidin As, 2019)).

Dalam pemberdayaan bentuk pariwisata pantai atau pesisir dapat dikembangkan dengan strategi pembangunan yang memanfaatkan modal sosial masyarakat, khususnya rasa saling memiliki masa depan bersama dan bekerja sama sehingga mengoptimalkan kualitas dan

kuantitas jaringan, komunikasi, inisiatif, inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta kelestarian lingkungan hayati. Unsur-unsur strategis pengembangan dan pengelolaan pariwisata pantai atau pesisir mencakup, pertama, kebijakan pemerintah akan pengembangan pariwisata pantai atau pesisir yang secara operasional dapat dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan pendekatan kontingensi (sesuai karakteristik geografis dan sosio kultural masyarakatnya). Namun hal ini perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan benturan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pembuatan kebijakan, agar kebijakan pengelolaan kawasan pantai, pesisir dan bahari didukung masyarakat banyak. Salah satu contoh kurang optimalnya kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam laut dan pesisir. Kedua, pemberdayaan modal sosial masyarakat pantai atau pesisir dalam pengembangan kawasan pariwisata pantai atau pesisir, berupa terbukanya akses peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya (pemerintah daerah, tokoh adat, perguruan tinggi setempat, LSM dan lainnya) dalam pembuatan kebijakan

pengembangan pariwisata pantai, pelatihan, pendampingan dan kemitraan usaha ekonomi kreatif masyarakat yang mendukung pariwisata pantai. Ketiga, pengembangan e-coastal tourism secara terpadu antara elemen masyarakat pantai atau pesisir, swasta dan pemerintah. Implementasi private public partnership yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan modal sosialnya dalam pengembangan dan ekonomi kreatif pariwisata pantai atau pesisir. Keempat, pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur yang mendukung kualitas dan kuantitas pariwisata pantai atau pesisir serta kemudahan akses. Kelima, inovasi ragam dan fasilitas pariwisata pantai (Wulandari, 2012).

Jiwa partisipasi masyarakat adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan dan cita-cita bersama. Karena itu seluruh warga masyarakat harus selalu bekerjasama, bahu membahu, saling membantu dan mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam masyarakat. Sementara itu pendapat lain yang menyatakan tentang political will pemerintah yang juga harus tuntas dalam menangani kemiskinan masyarakat pantai (termasuk nelayan) termasuk pembinaan keluarga nelayan (anak dan isteri). Penanganan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dapat

membangkitkan peran kelompok masyarakat nelayan sehingga kelompok tersebut menjadi mandiri dan harmonis terhadap mitra usaha (lembaga ekonomi dan keuangan) dan dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal menggali potensi sumber daya alam yang tersedia.

Selama masa pandemi COVID-19 dengan dilakukannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ada perlu ditingkatkan kembali dan juga melakukan pengembangan agar lebih berdaya guna dalam jangka waktu yang panjang (Situmorang et al., 2021). Adanya pandemi covid-19 ini memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, seperti pada masyarakat yang beprofesi menjadi pedagang tidak diperbolehkan untuk berdagang, serta masyarakat yang bekerja sebagai pekerja seni sudah tidak dapat memasarkan karya seninya karna kurangnya kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Adanya perubahan pada tatanan kehidupan ini mengakibatkan masyarakat harus siap dengan berbagai perubahan yang ada serta mulai berpikir kreatif untuk dapat terus menjalankan kehidupan di masa pandemi seperti saat ini

(Prasetya et al dalam (Bahtera, 2021)).

Kendala pada masyarakat kelompok nelayan lainnya seperti tidak menerapkan teknologi yang ada yang telah diberikan, sumber daya manusia yang rendah sehingga para masyarakat pesisir sulit beradaptasi dengan kemajuan teknologi, kurangnya kerjasama yang mengakibatkan masyarakat tersebut tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapi contohnya masalah tentang permodalan dan pemasaran hasil dan tidak bisa mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan (Soeprodjo et al., 2020).

Dalam penanganan dampak Covid-19 pada dunia pendidikan, seluruh stakeholders harus bahu membahu berbuat. Kondisi ini tidak boleh terlepas pandang dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya operasionalisasi di lapangan (Syah, 2020). Perubahan yang terjadi pada masa pandemi membawa peralihan bentuk yang sangat signifikan salah satunya terjadi pada perubahan sosial. Masyarakat juga tidak memiliki persiapan dalam menghadapi perubahan yang muncul dari adanya Covid-19. Perlu dinyatakan bahwa dampak pandemi telah memaksa masyarakat untuk mengalami perubahan perubahan dalam bentuk menjalani hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya (Sulistio, 2022).

SIMPULAN

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi Covid-19 pada pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir pantai mengalami berbagai kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan dalam upaya perkembangan serta kemajuan masyarakat pesisir pantai. Permasalahan tersebut yang didasarkan pada terjadinya pandemi sehingga besar dampaknya jadi menghambat berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat pada wilayah pesisir pantai tersebut.

Keadaan ini membuat berbagai pihak yang terkait dengan pemberdayaan harus melakukan alternatif kegiatan agar hal ini tidak terus berkelanjutan dan jalan ditempat. Sehingga masyarakat maupun penyelenggara pemberdayaan dapat terus melakukan program pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan agar dapat memiliki, memajukan, hingga mengembangkan potensi sehingga mampu mengatasi dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi secara lebih mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin As, Z. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabhu*,

- 1(2), 84–122.
<https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95>
- Amriwan, A. (n.d.). *SUKABUMI Azis Amriwan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung PENDAHULUAN Karakteristik sumberdaya laut yang bersifat terbuka atau tanpa kepemilikan (open acces property) nampaknya mulai kehilangan makna bagi nelayan. 23(2), 244–263.*
- Aset, B., Desa, D. I., & Badung, K. (2013). *Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Pendawa Dalam Pembangunan Pariwisata.*
- Bahtera, N. I. (2021). Upaya Mitigasi Dampak Covid-19 melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banyuasin Kabupaten Bangka. *International Journal of Community Service Learning, 5(2), 95–106.*
<https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i2.34011>
- Cholisin. (2011). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011).* 19–20.
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT.pdf
- GASSING, A. S. (2021). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM KAMPUNG REWAKO SEBAGAI UPAYA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI COVID-19 DI DESA BUAKKANG KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA.* 6.
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.* In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Iswari, I. G. A. Y., Indrayani, L., & Kadek, S. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 11(2).*
- Judithia, D. (2019). *Proses Adaptasi Ikatan Mahasiswa Fakfak Di Kota Bandung. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 54–69.*
<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1558/>
- Kristiyanti, M. (2016). *Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pebdekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu, 180, 752–760.*
<http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4264/1270>
- Lukman, A. I. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal. DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 2(1), 180–190.*
- Maulida, A. R. (2021). *Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalisuren*

- Kecamatan Tajur Halang.
- Munawar, N. (201 C.E.). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591>
- Ramadhani, A. (2017). PEMBERDAYAAN HASIL PERIKANAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI JAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 135(January 2006), 989–1011. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2018.07.012><http://www.capsulae.com/media/Microencapsulation-Capsulae.pdf><https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2019.05.001>
- Safyuddin, Yunus, Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan*: (Vol. 31, Issue 2).
- Situmorang, L. M., Widhy, L. R., & Indriastuty, P. D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, December, 2021. https://www.researchgate.net/profile/Lidya-Situmorang-3/publication/348049117_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_DI_INDONESIA_PADA_MASA_PANDEMI_COVID-19/links/5fedc11a45851553a00a3624/PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DI-INDONESIA-PADA-MASA-PANDEMI-COVID-19.pdf
- Soeprodjo, R. G. D., Joorie M. Ruru, & Very Y. Londa. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89), 1–8.
- Sulistio, R. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Abdi Mas Adzkia*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.30829/adzkia.v2i2.9829>
- Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>
- WHO. (2020). Menjaga Kesehatan Lingkungan. *WHO (World Health Organization)*, 5–76.
- Wiwik, & M.Farid Ma'ruf, S.Sos., M. A. (2011). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PANTAI DI KABUPATEN TUBAN. *1204067400(Turnbull 1986)*, 6–17.
- Wulandari, F. R. (2012). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pantai dalam Pengembangan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Hayati Daerah Pantai*. 1–12.